



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN KINERJA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Tahun Anggaran 2022

ALAMAT KANTOR:

Jalan Panjaitan No. 7, Niti Mandala Renon - Denpasar
Telp. 0361-225859 | Fax. 0361-227810



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KATA PENGANTAR

Puja pengastuti dan angayubagia kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2022 dapat tersusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Perangkat Daerah atas kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022. Laporan ini menyajikan informasi tentang target dan pencapaian kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan untuk peningkatan kinerja serta penilaian kinerja di tahun yang akan datang.



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum	2
1.3. Aspek Strategis.....	5
1.4. Landasan Hukum.....	6
1.5. Tujuan.....	9
1.6. Kekuatan Sumber Daya Yang Ada.....	10
1.7. Sistematika Penyajian.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis Tahun 2018-2023	14
2.2. Target Kinerja Tahun 2022.....	23
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali	26
3.2. Analisa Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali	28
3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	58
BAB IV PENUTUP	
4.1. Tinjauan Umum Keberhasilan	66
4.2. Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja	66
4.3. Saran dan Rekomendasi.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.

Laporan kinerja yang disusun oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali adalah bentuk pelaksanaan kinerja selama tahun 2022 dan merupakan penjabaran dari tugas pokok yang telah ditetapkan sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2022. Laporan Kinerja juga merupakan sarana pengukuran/tolok ukur dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada pasal 3 ayat (1) point d.5. disebutkan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik, dan urusan pemerintahan bidang Persandian.

Agar mencapai hasil (outcome) yang optimal, maka program kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali yang telah dianggarkan melalui APBD/P-APBD tahun 2022 sesuai visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (target kinerja) dapat terlaksana dengan baik sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali



Tahun 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali tahun 2018 s/d 2023.

1.2 Gambaran Umum Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Bali.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada pasal 3 ayat (1) point d.5. disebutkan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik, dan urusan pemerintahan bidang Persandian.

Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, pada Lampiran V disebutkan bahwa tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Provinsi;
- Pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Provinsi;

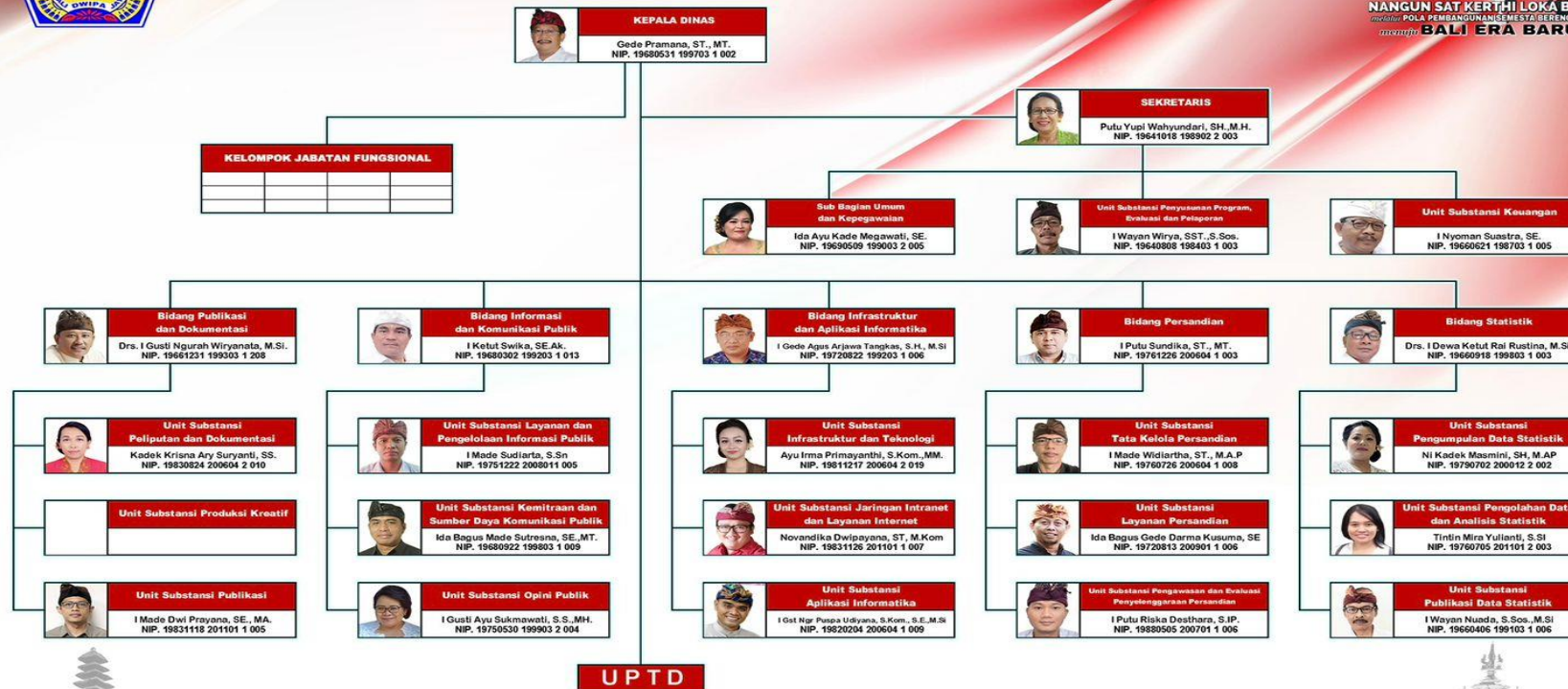


- Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
 - Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas, dan
 - Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari 1 unit eselon II, 6 unit eselon III (terdiri dari 1 sekretariat dan 5 bidang), 1 unit eselon IV, 17 unit Sub Koordinator serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali sebagai berikut:





STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI



**“Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya,
untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala
Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali sesuai dengan Prinsip TRISAKTI Bung Karno :
Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
melalui Pembangunan secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi
dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945”**



1.3 Aspek Strategis

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika memiliki aspek strategis yaitu menyediakan dan menyebarkan informasi pembangunan dan pemerintahan yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat. Selain itu, pemberdayaan informasi yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali sesuai fungsi yakni sebagai penyedia informasi. Informasi yang dihimpun, diolah dan disediakan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali di dalam memberikan layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat juga memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mempercepat proses layanan masyarakat sesuai dengan kemampuan dalam pemanfaatan TIK melalui pembangunan infrastruktur TIK di daerah dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan penyebaran informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di daerah Bali.

Permasalahan utama yang dihadapi pemerintah pada era digital saat ini adalah belum maksimalnya pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam pelayanan pemerintahan serta masifnya penyebaran berita bohong/ ujaran kebencian oleh masyarakat. Permasalahan utama tersebut bila ditinjau dari berbagai aspek dapat dipetakan dalam isu strategis sbb:

1. Belum maksimalnya penyebaran informasi program dan kebijakan pemerintah;
2. Belum maksimalnya keterbukaan informasi publik;
3. Kurangnya pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola pemerintahan secara elektronik;
4. Rendahnya pengolahan, analisis data dan informasi sektoral; dan
5. Rendahnya pengamanan data dan informasi pemerintah



Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media cetak;
 - b. Pemberdayaan masyarakat melalui TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi);
 - c. Meningkatkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
3. Pengendalian bandwidth dan pendistribusian ke Perangkat Daerah;
4. Pengelolaan dan Pengembangan Data Center;
5. Meningkatkan kualitas keamanan data dan informasi pemerintah;
6. Meningkatkan Ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas.

1.4 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali tahun 2022 disusun dengan landasan hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



- i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- l. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- m. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- n. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- o. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar



- Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- r. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom;
 - s. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - t. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
 - u. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2018-2023;
 - v. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

1.5 Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali selama tahun 2022. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika



dan Statistik Provinsi Bali dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya, sehingga program di tahun mendatang dapat disusun dengan efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.6 Kekuatan Sumber Daya Yang Ada

1. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sebanyak 252 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Komposisi Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	75 orang	(29,76%)
2	CPNS	1 orang	(0,40%)
3	Honorar	176 orang	(69,84%)
	Jumlah	252 orang	(100%)

b. Komposisi Jabatan PNS

No.	Jabatan PNS	Jumlah	Prosentase
1	Jabatan Struktural	7 orang	(9,21%)
2	Jabatan Fungsional	30 orang	
	Arsiparis Ahli Madya	1 orang	(1,32%)
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	2 orang	(2,63%)
	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1 orang	(1,32%)
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	6 orang	(7,89%)
	Pranata Komputer Ahli Muda	3 orang	(3,95%)
	Sandiman Ahli Muda	2 orang	(2,63%)
	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1 orang	(1,32%)
	Statistisi Ahli Muda	2 orang	(2,63%)
	Arsiparis Ahli Muda	1 orang	(1,32%)
	Penerjemah Muda	1 orang	(1,32%)



No.	Jabatan PNS	Jumlah	Prosentase
	Pranata Humas Ahli Pertama	1 orang	(1,32%)
	Pranata Komputer Ahli Pertama	8 orang	(10,53%)
	Arsiparis Penyelia	1 orang	(1,32%)
3	Jabatan Fungsional Umum	39 orang	(51,32%)
	Jumlah	76 orang	(100%)

c. Komposisi Eselon PNS :

No.	Eselon PNS	Jumlah	Prosentase
1	Eselon II.a	1 orang	(1,32%)
2	Eselon III.a	5 orang	(6,58%)
3	Eselon IV.a	1 orang	(1,32%)
4	Jabatan Fungsional	30 orang	(39,46%)
5	Staf	39 orang	(51,32%)
	Jumlah	76 orang	(100%)

d. Komposisi Pendidikan PNS :

No.	Pendidikan PNS	Jumlah	Prosentase
1	SD	orang	(0%)
2	SLTP	orang	(0%)
3	SLTA	5 orang	(6,58%)
4	D III/SARMUD	2 orang	(2,63%)
5	S 1	40 orang	(52,63%)
6	S2	28 orang	(36,84%)
7	S3	1 orang	(1,32%)
	Jumlah	76 orang	(100%)

e. Komposisi Pendidikan Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) :

No.	Pendidikan Pegawai Tidak Tetap	Jumlah	Prosentase
1	SLTA	30 orang	(17,05%)
2	D I	1 orang	(0,57%)
3	D III	4 orang	(2,27%)
4	D IV	1 orang	(0,57%)



No.	Pendidikan Pegawai Tidak Tetap	Jumlah	Prosentase
5	S 1	131 orang	(74,43%)
6	S2	9 orang	(5,11%)
	Jumlah	176 orang	(100%)

2. Sarana dan Prasarana

Jumlah aset Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

No	Pembidangan Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Golongan Tanah meliputi :			
	a. Tanah	1	Bidang	
2.	Golongan Peralatan dan Mesin meliputi :			
	a. Alat-alat besar	-	Buah	
	b. Alat-alat angkutan	28	Buah	Roda Empat dan Roda Dua
	c. Alat-alat bengkel dan alat ukur	2	Buah	
	d. Alat kantor dan rumah tangga	2.375	Buah	Barang-barang inventaris
	e. Alat studio dan komunikasi	246	Buah	Alat-alat studio
3.	Golongan Gedung dan Bangunan meliputi :			
	a. Bangunan gedung	19	Buah	Gedung perkantoran dan monumen
4.	Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan meliputi :			
	a. Instalasi	-	Buah	
	b. Jaringan	1	Buah	Jaringan telepon
5.	Golongan Aset Tetap Lainnya meliputi :			
	a. Buku dan perpustakaan	22	Paket	Judul buku yang ada diperpustakaan
	b. Barang dan corak kebudayaan	1	Buah	Pahatan kayu



1.7 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali selama tahun 2022. Capaian kinerja tahun 2022 diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, menguraikan secara ringkas latar belakang, peran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali serta struktur organisasi.
- BAB II Perencanaan Kinerja, menguraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali tahun 2022 meliputi RPJMD Provinsi Bali.
- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- BAB III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022, menguraikan pengukuran kinerja 2022, analisis pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis tahun 2022 tahun 2018 – 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
- BAB IV Penutup, menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali tahun 2022 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2018-2023

A. Visi

VISI: “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA MENUJU BALI ERA BARU Mengandung makna “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, untuk Mewujudkan Kehidupan Krama dan Gumi Bali yang Sejahtera dan Bahagia, Skala-Niskala Sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945”.

B. Misi

Visi: “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana memiliki 22 misi, dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali mengemban misi ke 22 yaitu Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Terbuka, Transparan, Akuntabel dan Bersih serta Meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu Yang Cepat, Pasti dan Murah.

C. Tujuan

Pada tabel 6.3 (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Semesta Berencana Provinsi Tahun 2018-2023) dalam misi ke 22 (Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif, Terbuka, Transparan, Akuntabel dan Bersih serta Meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu yang Cepat, Pasti dan Murah) menetapkan 2 tujuan yaitu:

1. Tujuan 1; meningkatnya kualitas pelayanan publik.
Sasaran: meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik
2. Tujuan 2; meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.
Sasaran: terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.



Tujuan tersebut di atas sejalan dengan tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali yaitu TERWUJUDNYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN, dengan Indikator: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Tujuan, Sasaran dan Program yang ditetapkan pada Renstra 2018-2023 sbb:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	71	74	77	93	93,2
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,35	1,72	2,18	2,52	3
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase data statistik sektoral yang valid	100	100	100	100	100
			Persentase keamanan transaksi data dan informasi publik	20	40	60	80	100
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,50	81,00	81,50	82,00	82,50

Tujuan, Sasaran/program yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	93
			- Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	Indeks	81
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,52



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
			- Jumlah Sistem Pemerintah berbasis elektronik	Aplikasi	25
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase data statistik sektoral yang valid	Persen	100
			- Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan diseminasi	Sektor	11
			Persentase keamanan transaksi data dan informasi publik	Persen	80
			- Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	OPD	38
			- Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun	OPD	38
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Poin	82,00
			- Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	Dokumen	16
			- Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	Dokumen	75
			- Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	Bulan	12
			- Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	Paket	1
			- Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	Bulan	12
			- Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai	Unit	539

D. Strategi Dan Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan



daerah yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan, maka strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Bali 2018-2023 sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik

Sasaran RPJMD : Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik

Strategi : Membangun sarana prasarana pelayanan publik yang terintegrasi antar instansi lembaga pemerintah daerah.

Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

Sasaran RPJMD : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Strategi : Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi.

Kebijakan : Pelayanan publik terselenggara dengan cara-cara yang efisien, efektif dan transparan.

Pada Tabel 6.2 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Telah ditetapkan 51 strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023 yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pada era digital saat ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pelaksanaan strategi dan kebijakan tersebut karena dalam proses pelaksanaannya tentu akan memanfaatkan sarana teknologi informasi. Didalam strategi tersebut secara khusus Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali adalah berperan pada Strategi; Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi desa adat dan subak khususnya pada Kebijakan; Menjadikan wantilan Desa Adat sebagai wahana Balinese Culture Meeting Point yang



dilengkapi dengan Wifi gratis dan fasilitas pendukung seni budaya lainnya. Disamping itu Strategi: Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya sebagai objek wisata. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan tentang keterbukaan informasi publik, secara mandiri juga melaksanakan pameran pembangunan dan pertunjukan rakyat. Secara umum Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali mendukung strategi Perangkat Daerah lainnya dibidang teknologi informasi.

Dilatarbelakangi dari Isu Strategis/Masalah Strategis pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali yaitu:

- a. Belum Optimalnya Pengelolaan Informasi Publik;
- b. Belum Optimalnya Pengembangan Komunikasi Publik;
- c. Belum Optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Aplikasi TIK;
- d. Belum Optimalnya Pengamanan Informasi Pemerintah;
dan
- e. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Maka Strategi yang ditempuh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman dan kesediaan masyarakat tentang pemanfaatan media secara sehat;
- b. Melaksanakan pelayanan komunikasi informasi publik dan penanganan aduan masyarakat;
- c. Menciptakan keamanan transaksi data dan informasi dan pemberdayaan TIK;
- d. Melaksanakan pelayanan, pemeliharaan dan pengembangan sistem aplikasi IT;
- e. Melaksanakan penyajian data statistik sektor yang akurat melalui pengumpulan dan analisis data.

Arah Kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali adalah sebagai berikut:



- a. Mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan pimpinan dan kebijakan;
- b. Peningkatan kualitas aparatur dan SDM yang profesional dibidang kehumasan;
- c. Peningkatan kualitas sarana prasarana berbasis IT;
- d. Mengembangkan jejaring komunikasi dengan media massa, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah dan instansi vertikal;
- e. Penerapan SOP / standar pelayanan informasi;
- f. Membuat perencanaan pembangunan yang aspiratif;
- g. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar berbagai sektor;
- h. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas komunikasi, informasi serta kerjasama dengan media massa dalam rangka memperkuat watak dan jati diri masyarakat Bali sebagai satu kesatuan budaya nasional;
- i. Mengupayakan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang berbasis teknologi informasi /komputerisasi dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan akurasi data sebagai sumber informasi dalam pembuatan kebijakan;
- j. Memantapkan sistem penyiaran yang berkeadilan, bermartabat dan bermanfaat guna mewujudkan program siaran yang sehat, cerdas dan berkualitas untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan bangsa, persatuan kesatuan serta mengamalkan nilai-nilai budaya Indonesia;
- k. Meningkatkan kualitas data pendukung perencanaan daerah;
- l. Mewujudkan pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

E. Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali telah menetapkan Indikator Kinerja (IKU) untuk mengukur



keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD dan Renstra Tahun 2018-2023. Adapun Indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sebagaimana tabel berikut:



Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Penjelasan (alasan)	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
TERWUJUDNYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	Indeks Sistem Pemerintahtan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Nilai indeks dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan pada indikator. Domain dan Aspek Penilaian : Domain 1: Kebijakan Internal SPBE dengan total bobot 17%. Domain 2: Tata kelola SPBE dengan total bobot 28% Domain 3: layanan SPBE dengan total bobot 55%.	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	
Terwujudnya pelayanan komunikasi dan informatika yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayan informasi	Tingkat kepuasan diperoleh dari kuesioner kepada masyarakat.	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah	Persentase keamanan transaksi data dan informasi	Jumlah transaksi data dan informasi yang diamankan dibagi dengan jumlah transaksi data dan informasi yang ada x 100%	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Meningkatnya ketersediaan data statistik yang berkualitas.	Persentase data statistik sektoral yang valid	Jumlah data statistik sektoral yang valid dibagi data yang tersedia x 100%	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral



F. Program Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2022

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 6 kegiatan dan 22 sub kegiatan.
- b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Program ini bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang program pembangunan di Provinsi Bali serta meningkatkan kecerdasan masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan Komunikasi dan Informasi kepada masyarakat dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Program ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tata pemanfaatan media secara sehat serta mampu melindungi hak masyarakat maupun lembaga pemerintah dan swasta dalam memenuhi kebutuhan informasi.
- c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. Program ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan dan kelancaran operasional perangkat infrastruktur dan jaringan e-Government, menjamin kesiapan operasional perangkat infrastruktur dan jaringan eGovernment dan memperpanjang waktu penggunaan perangkat infrastruktur dan jaringan e-Government. Program ini juga bertujuan untuk mengembangkan Sistem Informasi/Aplikasi sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur melalui pemanfaatan sistem informasi. Program ini diharapkan mampu meningkatkan layanan infrastruktur TIK dalam menunjang kinerja aparatur dan pelayanan sehingga dapat menciptakan kelancaran pelaksanaan tugas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), SMA/SMK dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan pemerintah Provinsi Bali.
- d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Program ini bertujuan untuk melakukan pencatatan data dan informasi yang terstruktur yang akan mendukung proses



perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Program ini menjadi dasar untuk melakukan penyusunan analisa statistik sektoral yang mencakup 11 sektor yaitu sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan HAM, yang akan dipublikasi secara luas.

- e. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi. Program ini bertujuan untuk mewujudkan keamanan transaksi data dan informasi antar lembaga serta pelaksanaan kegiatan maupun administrasi perkantoran. Program ini memberikan standarisasi keamanan data, sehingga informasi pelaksanaan administrasi perkantoran bisa terlaksana secara lancar. Hal ini dilandaskan pada tugas dan tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali atas keamanan data dan informasi yang penting diperlukan Kantor Gubernur Bali.

2.2 Target Kinerja Tahun 2022

Sasaran strategis 1. Terwujudnya pelayanan komunikasi dan informatika yang berkualitas; melalui peningkatan pelayanan informasi yang optimal dan professional kepada masyarakat, mewujudkan keterbukaan informasi publik dan peningkatan layanan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, didukung program dan kegiatan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan:
 - a. Perencanaan. Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, melalui kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pemerintah Daerah Provinsi.
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika; melalui kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.

Sasaran strategis 2. Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah, yang berdampak pada Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan secara elektronik yang berbasis teknologi e-government diwujudkan dengan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi melalui kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, dan kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi.

Sasaran strategis 3. Meningkatnya kualitas data statistik sektoral, agar Terwujudnya akurasi data statistik sektoral dengan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral melalui kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2022 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Lampiran perjanjian kinerja sbb:



Sasaran Strategis	Indikator	Target
Terwujudnya Komunikasi dan Informasi Publik yang Efektif dan Efisien	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,52

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.730.139.026	APBD
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	32.971.039.965	APBD
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	132.384.131.566	APBD
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	486.822.218	APBD
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	386.023.636	APBD
	TOTAL	185.958.156.411	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Provinsi Bali

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan program kegiatan di tahun 2022 maka Laporan Kinerja tahun 2022 membahas tentang pencapaian hasil-hasil berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

Untuk mengetahui hasil yang diperoleh maka dilakukan pengukuran kinerja sehingga dapat dinilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program / kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Adapun Pengukuran Kinerja disajikan sesuai tabel 3.1 sebagai berikut:



Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Diskominfos Prov. Bali

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir Tahun Renstra 2023	Capaian s/d 2022 Terhadap 2023 (%)
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TERWUJUDNYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,68	2,52	3,68	146,03%	3	122,67%
a.	Terwujudnya pelayanan komunikasi dan informatika yang berkualitas							
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	93,62	93	97,72	105,08%	93,2	104,85%
		Nilai evaluasi manajemen kinerja	80,43	82	*)	*)	82,50	*)
b.	Meningkatnya ketersediaan data statistik yang berkualitas.	Persentase data statistik sektoral yang valid	100	100	100	100	100	100%
c.	Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah	Persentase keamanan transaksi data dan informasi	60	80	80	100	100	80%

Keterangan : *) masih dalam proses penilaian



3.2 Analisa Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Bali

Tujuan Terwujudnya Komunikasi dan Informasi Publik yang Efektif dan Efisien dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menargetkan indeks sebesar 2,52. Pada tahun sebelumnya target indeks SPBE 2,18 dan terealisasi 3,68 dan merupakan capaian tertinggi untuk tingkat provinsi. Oleh sebab itu pada tahun 2022 penilaian SPBE tidak dilakukan dan nilai Indeks SPBE Provinsi Bali tetap 3,68. Pada pemeringkatan nilai, indeks 3,68 termasuk peringkat dengan kategori sangat baik karena berada di level 3,5 – 4,2. Kategori indeks SPBE sesuai ketentuan disajikan sesuai tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kategori indeks SPBE

No.	Nilai Indeks	Kategori
1	4,2 - 5	Memuaskan
2	3,5 -< 4,2	Sangat Baik
3	2,6 -< 3,5	Baik
4	1,8 -< 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Berikut hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tahun 2021.

Tercapainya target yang telah ditetapkan tersebut tidak terlepas dari peranan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan utamanya lancarnya pelaksanaan program-program pendukung dan prioritas pada

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Pelaksanaan program diuraikan sbb:

No	Provinsi	Indeks SPBE	Predikat
1	Bali	3,68	Sangat Baik
2	DI Yogyakarta	3,49	Baik
3	DKI Jakarta	3,47	Baik
4	Jawa Barat	3,28	Baik
5	Kalimantan Barat	3,26	Baik
6	Nangroe Aceh Darussalam	3,19	Baik
7	Banten	3,15	Baik
8	Nusa Tenggara Barat	2,94	Baik
9	Jawa Timur	2,82	Baik
10	Bengkulu	2,79	Baik
11	Sumatera Utara	2,77	Baik
12	Lampung	2,76	Baik
13	Jawa Tengah	2,74	Baik
14	Sumatera Barat	2,69	Baik
15	Sumatera Selatan	2,62	Baik
16	Bangka Belitung	2,60	Baik
17	Kalimantan Selatan	2,60	Baik
18	Riau	2,55	Cukup
19	Gorontalo	2,51	Cukup
20	Kalimantan Utara	2,38	Cukup
21	Nusa Tenggara Timur	2,28	Cukup
22	Sulawesi Utara	2,26	Cukup
23	Kalimantan Timur	2,22	Cukup
24	Jambi	2,21	Cukup
25	Sulawesi Selatan	2,05	Cukup
26	Papua Barat	2,04	Cukup
27	Sulawesi Barat	2,03	Cukup
28	Kepulauan Riau	1,96	Cukup
29	Maluku	1,93	Cukup
30	Papua	1,80	Cukup
31	Sulawesi Tengah	1,38	Kurang
32	Sulawesi Tenggara	1,05	Kurang
33	Kalimantan Tengah	1,00	Kurang
34	Maluku Utara	1,00	Kurang



1. Program pengelolaan aplikasi informatika

a. Layanan Free Wifi

Pada tahun 2022 layanan BKK Free Wifi bagi Desa Adat, Objek Wisata, dan Puskesmas pada 1.681 titik layanan wifi untuk mendorong terpenuhinya penyediaan Infrastruktur dasar, berupa jaringan fiber optik hingga ke pelosok wilayah di Provinsi Bali untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur terintegrasi serta konektivitas antar-wilayah. Layanan Free Wifi tersebut dikecualikan untuk Kabupaten Badung, karena dilaksanakan melalui APBD Pemerintah Kabupaten Badung. Data layanan BKK Free Wifi terinci sesuai tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Data Layanan BKK Free Wifi

NO	KAB./KOTA	Lokasi Pemasangan			Jumlah Titik Wifi
		Puskesmas	Obyek Wisata	Desa Adat	
1	DENPASAR	11	8	35	54
2	GIANYAR	13	61	273	347
3	BANGLI	12	43	168	218
4	KLUNGKUNG	9	17	122	148
5	KARANGASEM	12	15	190	217
6	BULELENG	20	26	169	215
7	JEMBRANA	10	15	64	89
8	TABANAN	20	24	349	393
9	BADUNG	dilaksanakan melalui APBD Pemerintah Kabupaten Badung			
JUMLAH		107	204	1.370	1.681

Selain layanan wifi gratis melalui BKK juga dilaksanakan layanan Wifi Gratis untuk SMAN/SMKN/SLBN se- Bali sebanyak 142 titik melalui APBD Provinsi Bali.

Tabel 3.4 Data Layanan Free Wifi di SMAN/SMKN/SLBN

NO	KAB./KOTA	SMAN	SMKN	SLBN	JUMLAH
1	DENPASAR	11	6	3	20
2	BADUNG	11	2	1	14
3	GIANYAR	8	8	1	17
4	TABANAN	9	3	1	13
5	BANGLI	5	9	1	15
6	KLUNGKUNG	8	2	1	11
7	KARANGASEM	10	6	1	17
8	JEMBRANA	7	5	1	13
9	BULELENG	18	13	2	33
JUMLAH		87	54	12	153



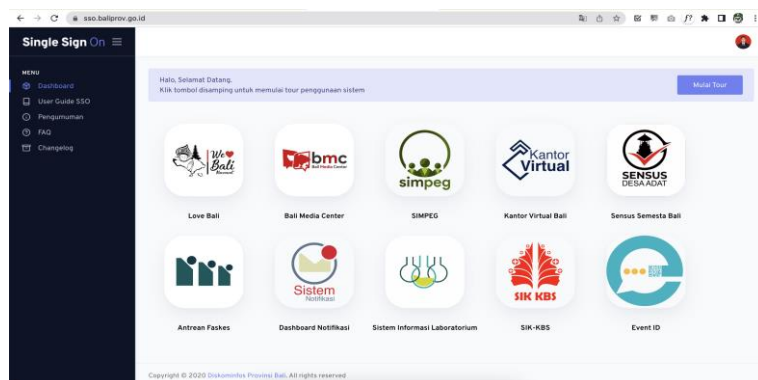
b. Pengelolaan/Pengembangan Aplikasi

Pengelolaan/pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik tahun 2022 terpusat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sejak ditetapkannya SPBE Provinsi Bali melalui Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Roadmap SPBE Provinsi Bali berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020. Aplikasi yang dibangun/dikembangkan pada tahun 2022 sebanyak 25 aplikasi untuk pelayanan kepada masyarakat dan pegawai pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Berbagai sistem aplikasi yang dikembangkan antara lain:

1. Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan

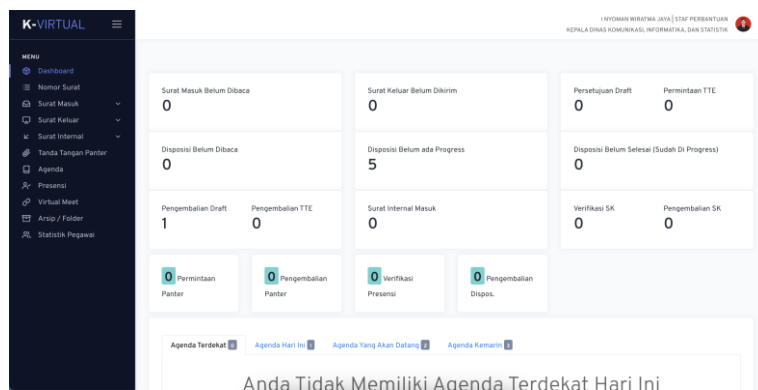
a. Pengembangan Single Sign On Pemprov Bali

[\(https://sso.baliprov.go.id/\)](https://sso.baliprov.go.id/)

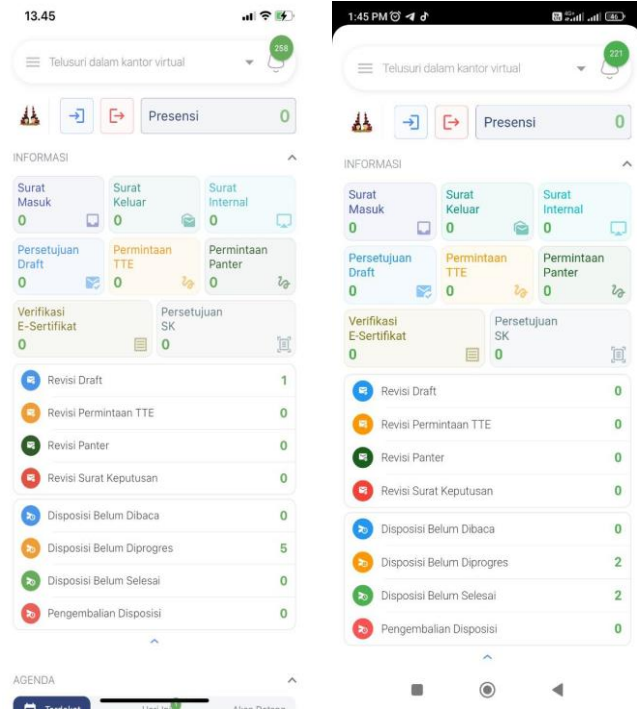


b. Kantor Virtual

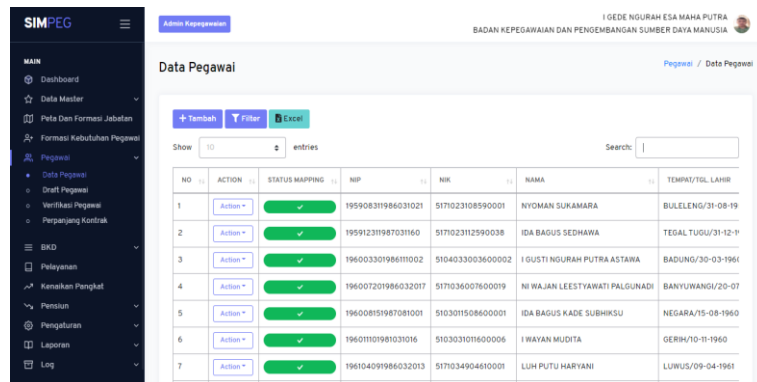
[\(https://kanal.baliprov.go.id/\)](https://kanal.baliprov.go.id/)



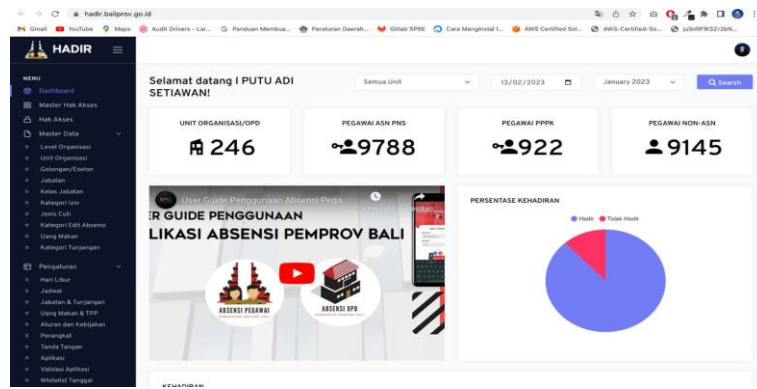
c. Kantor Virtual (App Android dan IOS)



d. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (<https://simpeg.baliprov.go.id/>)



e. Pengembangan Sistem Absensi (<https://hadir.baliprov.go.id/>)

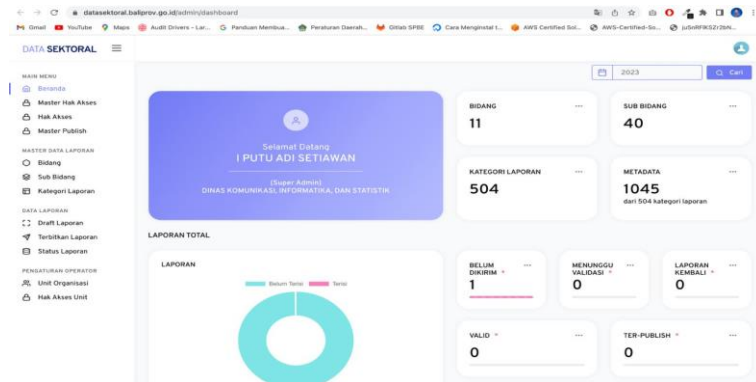


f. Pengembangan Aplikasi Absensi Pegawai (App Andorid dan IOS)



g. Data Sektoral Provinsi Bali

[\(http://datasektoral.baliprov.go.id/\)](http://datasektoral.baliprov.go.id/)

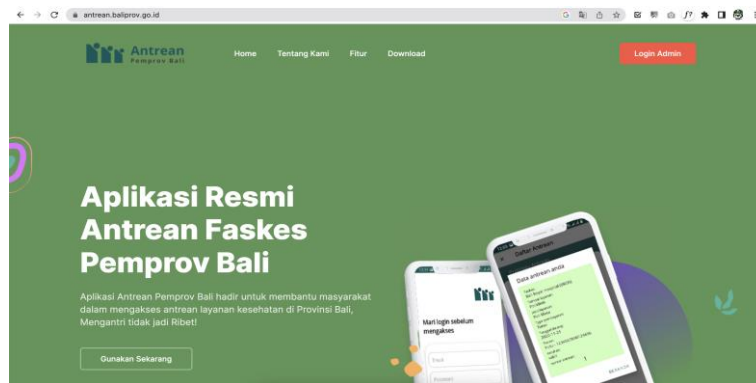


h. Seleksi Tim SPBE Pemerintah Provinsi Bali

<https://seleksitimspbe.baliprov.go.id>

i. Sistem Antrean Riwayat Kesehatan Administrator

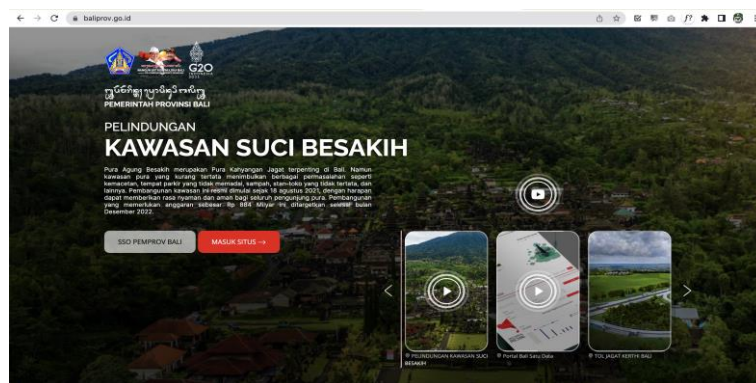
[\(https://antrean.baliprov.go.id/\)](https://antrean.baliprov.go.id/)



2. Sistem Informasi Publik

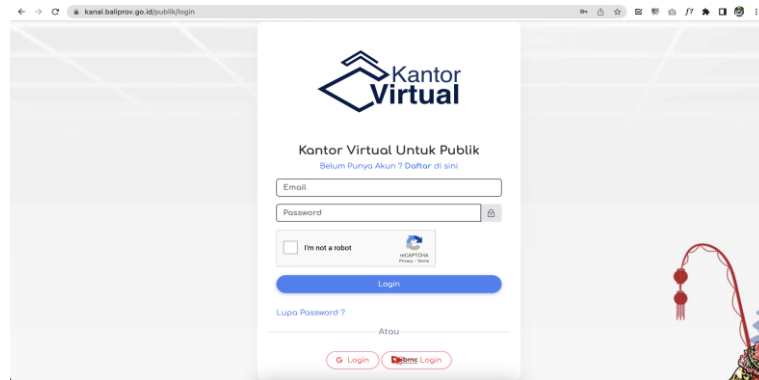
a. Pengembangan Website Portal Provinsi Bali

[\(https://baliprov.go.id/\)](https://baliprov.go.id/)



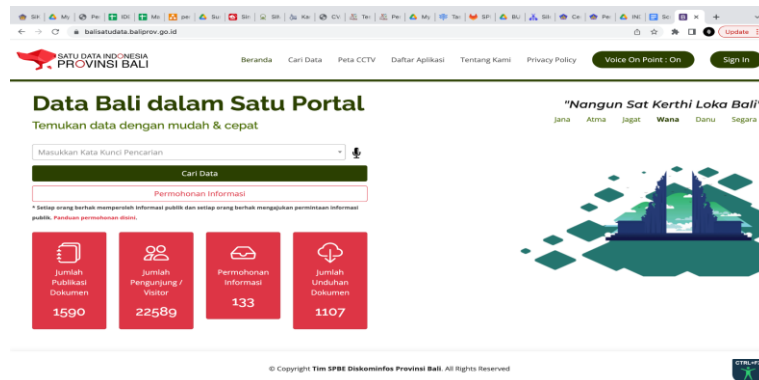
b. Kantor Virtual Publik

<https://kanal.baliprov.go.id/publik/login>



c. Satu Data Provinsi Bali

<https://balisatudata.baliprov.go.id/>



d. Sistem Informasi Pelayanan Perikanan (SIMPELkan)

<https://simplkan.baliprov.go.id/>



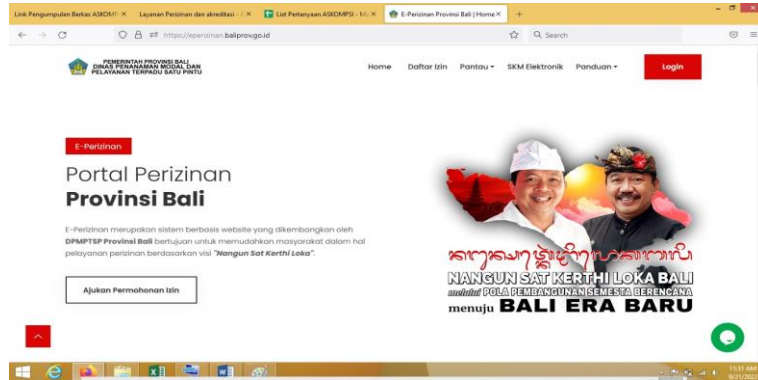
e. Website Sigapura dan Neraca Pangan

<https://sigapura.baliprov.go.id/>



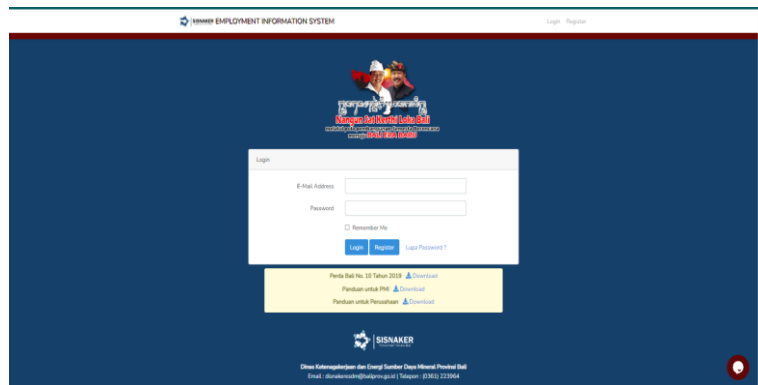
f. Pengembangan E-Perizinan

[\(https://eperizinan.baliprov.go.id/\)](https://eperizinan.baliprov.go.id/)



g. Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker)

[\(https://sisnaker.baliprov.go.id/\)](https://sisnaker.baliprov.go.id/)

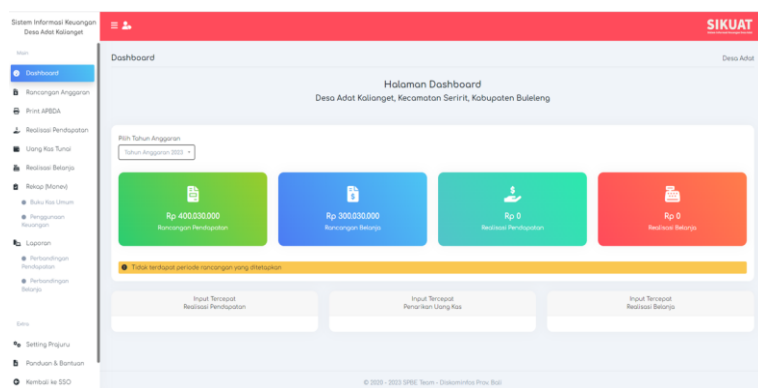


h. Aplikasi EventID (<https://event.baliprov.go.id/>)

i. Antrean dan Riwayat Kesehatan (APP Android dan IOS)

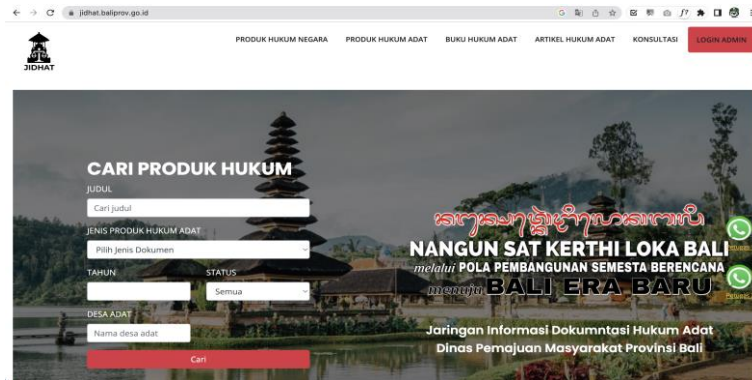
j. Sistem Keuangan Desa Adat (Sikuat)

[\(https://sikuat.baliprov.go.id\)](https://sikuat.baliprov.go.id/)



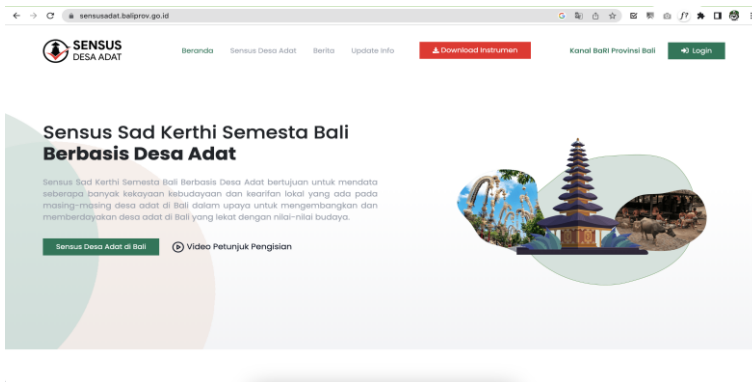
k. Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat (Jidhat)

(<https://jidhat.baliprov.go.id/>)



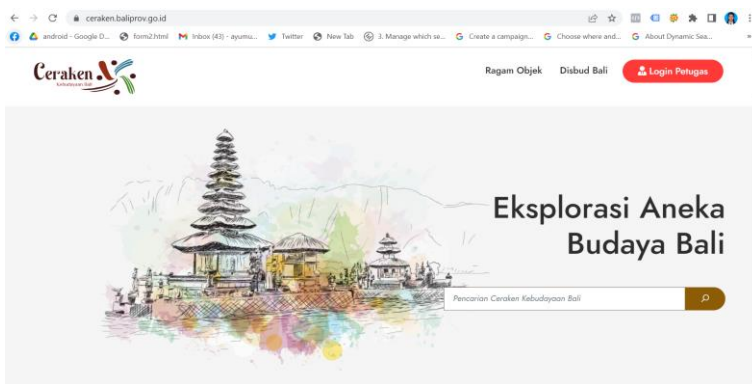
l. Sensus Desa Adat

(<https://sensusadat.baliprov.go.id/>)

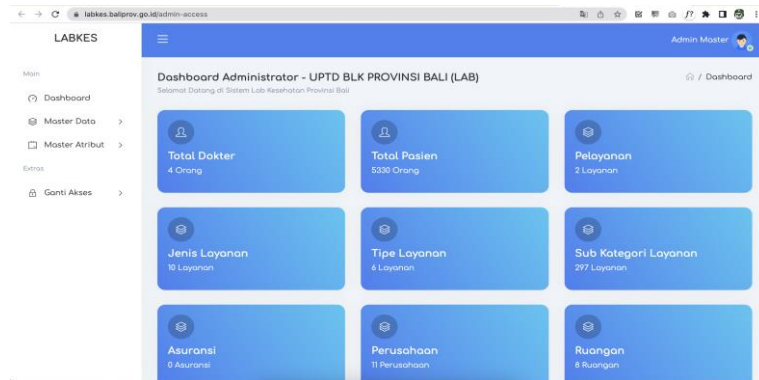


m. Ceraken Kebudayaan Bali

(<https://ceraken.baliprov.go.id/>)



- n. Sistem Layanan Laboratorium Kesehatan (SISLAB)
(<https://labkes.baliprov.dev>)



- o. SILEBAH (Sistem Informasi dan Pelayanan Online Pengujian Laboratorium Penyakit Hewan dan Bahan Pangan Asal Hewan)
(<https://silebah.baliprov.go.id/>)



- p. Bulan Bung Karno
(<https://bulanbungkarno.baliprov.go.id/>)

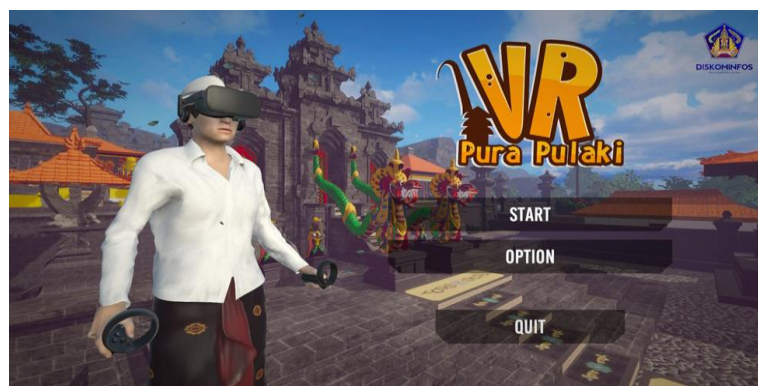


q. Pameran Virtual

[\(https://pameran.baliprov.go.id/\)](https://pameran.baliprov.go.id/)



r. Virtual Pulaki (APP On Oculus Store)



s. VR Rindik (APP On Oculus Store)



c. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Provinsi Bali

Pusat data Pemerintah Provinsi Bali berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan aplikasi (private cloud) serta pusat penyaluran akses internet keseluruhan perangkat daerah Provinsi Bali. Layanan private cloud berupa layanan virtual machine yang digunakan untuk menempatkan aplikasi, website dan data penyimpanan pada private cloud tersebut.

Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik saat ini mengelola Pusat Data



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan aplikasi serta pusat penyaluran akses internet keseluruhan Perangkat Daerah Provinsi Bali. Pusat Data juga memberikan layanan komputasi private cloud bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Layanan komputasi yang saat ini digunakan oleh



Perangkat Daerah (PD) tersebut berupa layanan virtual machine yang digunakan untuk menempatkan data, aplikasi dan website. Private cloud ini dibangun diatas perangkat keras HP

Blade Server C7000 dengan jumlah server fisik sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan total kapasitas terpasang :

vCPU : 128 core
(alokasi minus, tapi tidak digunakan secara penuh)
Memori : 768 GB (tersisa 300 GB)
Storage : 26 TB (tersisa 4TB)
Bandwidth : 1.5 Gbps

Permintaan virtual machine dari Perangkat Daerah (PD) semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini menyebabkan sumber daya komputasi dari private cloud semakin menurun kapasitasnya. Pusat Data juga belum memiliki backup server, sehingga apabila terjadi down pada Pusat Data maka aplikasi tidak bisa diakses oleh publik. Untuk memenuhi standar Pusat Data Nasional sebagaimana amanat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 32 ayat (2) dilakukan renovasi ruang pusat data dengan pekerjaan meliputi:



1. Civil & Interior Data Center
2. Mekanikal System
3. Electrical System
4. Structured Cable System
5. Electronic System
6. Other Services

Dalam rangka digitalisasi birokrasi dan efisiensi, maka ke depan Perangkat Daerah diarahkan menggunakan layanan cloud server, jadi pengadaan server baru tidak



ada di masing-masing Perangkat Daerah dan terpusat menggunakan layanan cloud server di Diskominfo. Guna menjamin layanan publik terkelola 24/7 dan untuk menambah kapasitas server dilakukan sewa layanan Cloud Virtual Private Server (VPS). Cloud Server adalah sistem komputasi yang berfungsi sebagai penyimpanan, pengelolaan, pemrosesan data pada server melalui internet sebagai medianya. Layanan Cloud VPS tersebut memiliki kapasitas CPU 16 Core, Memory 128 GB, Storage 2 TB, OS Linux Centos 7, dan 6 IP Publik.



Pembangunan infrastruktur telekomunikasi terpadu dan multi fungsi untuk mengintegrasikan layanan-layanan siaran TV digital terrestrial, telekomunikasi seluler, internet dan komunikasi radio komunitas, dalam wujud sebuah menara komunikasi bersama



sekaligus sebagai destinasi pariwisata teknologi terpadu berbasis kearifan lokal Bali berupa Taman Teknologi “Menara Turyapada Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali” diharapkan akan menjadi pengungkit perekonomian Bali, dan menjadi pusat pertumbuhan perekonomian baru.

Dalam rangka pembangunan Taman Teknologi tersebut, telah dilakukan

perencanaan dan pelaksanaan struktur menara dan bangunan pelengkap, perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan arsitektur menara dan bangunan



pelengkap, dan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing (MEP). Program tersebut merupakan program multi years.

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Guna mengoptimalkan hubungan antara instansi pemerintah, media massa dan stakeholder lainnya serta mengoptimalkan penyebaran informasi program dan kebijakan pemerintah, maka berbagai upaya telah ditempuh sbb:

- a. Penyebarluasan Program Pemprov Bali Melalui Media Cetak, Media Televisi, Radio, Media Online dan Media Sosial

Media Cetak



Media Televisi



Media Radio



Media Online



Media Sosial



b. Pelayanan Informasi Publik

Layanan informasi dilaksanakan dalam rangka penyampaian program-program pembangunan kepada masyarakat agar masyarakat tahu kegiatan yang dilakukan pemerintah sekaligus masyarakat dapat memantau,



mengawasi program-program tersebut. Pelayanan informasi melalui Pameran Pembangunan Provinsi Bali dilaksanakan secara virtual, Bimbingan Teknis PPID dilaksanakan 6 kali melalui Virtual Meeting dan penerbitan



Majalah Bungansandat yang diterbitkan 3 (tiga) kali dalam setahun



c. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah, melalui: Literasi Informasi dan media sosialisasi monitoring dan evaluasi akses informasi publik. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- Melaksanakan kegiatan literasi digital secara daring dengan peserta Perwakilan TP PKK di Kabupaten/Kota, Dharma Wanita Persatuan Kabupaten/Kota, Pranata Humas dan Perwakilan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;



- Melaksanakan literasi digital di 14 SMA/SMK di Kota Denpasar bekerjasama dengan relawan TIK;



- Melaksanakan literasi digital di 10 desa di Provinsi Bali bekerjasama dengan relawan TIK;
- Melaksanakan monitoring ketersediaan data maupun sarana terkait Keterbukaan Informasi Publik setiap PPID di seluruh Badan Publik Kabupaten/Kota di Provinsi Bali;
- Melaksanakan visitasi ke badan publik di seluruh Provinsi Bali dalam rangka penilaian badan publik tahun 2022 oleh Komisi Informasi Provinsi Bali;
- Melaksanakan sidang sengketa informasi publik sebanyak 11 kali oleh Komisi Informasi Provinsi Bali; dan



- Melaksanakan pemeringkatan badan publik tahun 2022 oleh Komisi Informasi Provinsi Bali.



d. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
Selama tahun 2022 kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- Penguatan Pelayanan Sound System

Pelayanan sound system melalui satu unit mobil, lengkap dengan perangkat sound beserta tenaga operatornya, dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan pimpinan dan kegiatan perangkat daerah

lainnya



- Pelaksanaan Forum Kehumasan Provinsi Bali diawali dengan pengumpulan data-data tentang isu-isu aktual dimasyarakat, dilanjutkan dengan analisis isu-isu, alternatif pemecahan masalah, dilanjutkan dengan sosialisasi pemecahan masalah melalui forum kehumasan
- Sosialisasi Penyebarluasan informasi program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali



3. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

- a. Melaksanakan Analisa kebutuhan SDM persandian (Jabatan Fungsional Sandiman) dan Analisa kebutuhan sumber daya keamanan informasi lainnya serta pengelolaan SDM Persandian untuk peningkatan kompetensi melalui pelatihan/bimbingan



teknis yang diselenggarakan BSSN atau pihak lain yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang berhubungan dengan pelaksanaan keamanan informasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali



- b. Cyber Security Incident Response Team (CSIRT)
Menyelenggarakan Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) untuk mendeteksi, menanggulangi dan



memulihkan segala bentuk ancaman serangan cyber yang bertujuan mengamankan informasi elektronik

- CSIRT adalah sebuah tim yang dibentuk untuk melakukan usaha-usaha untuk memitigasi, memperbaiki dan atau mengembalikan sebuah Sistem Elektronik ke kondisi normal. Pada Tanggal 5 Mei 2021 telah diresmikan Baliprov-CSIRT dengan anggota CSIRT



adalah seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Bali.

- Tahun 2022 telah dilakukan pendataan aset TIK dan risikonya (Risk Register) di seluruh perangkat daerah, UPTD dan SMA/SMK/SLB se Bali sebagai acuan untuk melakukan tindak lanjut dalam penanganan insiden

c. Kontra Penginderaan

Melaksanakan kegiatan Kontra Penginderaan (KP), layanan Jammer yang bertujuan pengamanan informasi

non elektronik Kontra Penginderaan adalah analisa pemindaian frekuensi dan pemeriksaan barang elektronik untuk



menghindari terjadinya penyadapan yang dapat berpotensi menjadi sumber kebocoran informasi. Tahun 2022 kegiatan ini dilakukan dengan melakukan fasilitasi kegiatan pengacakan sinyal (jammer) kepada pimpinan Negara dalam rangkaian kegiatan G-20.

d. Tanda Tangan Elektronik (TTE)

Implementasi Sertifikat Elektronik pada Tanda Tangan Elektronik (TTE) kepada seluruh pejabat es I dan II di lingkup Pemerintah Provinsi Bali, Sebagai salah satu upaya pengamanan informasi elektronik



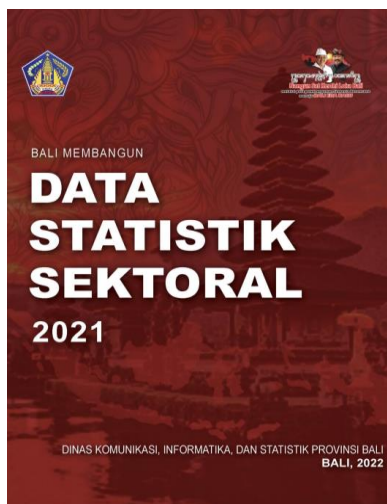
e. Memfasilitasi IT Security Assesment (ITSA)

ITSA adalah pengujian yang dilakukan pada sebuah aplikasi elektronik (software) dalam tahapan testing (sebelum aplikasi diluncurkan) dengan tujuan untuk menemukan celah kerentanan keamanan sehingga tidak menjadi sumber permasalahan dikemudian hari

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Bali Satu Data merupakan portal resmi data terbuka Provinsi Bali yang dirancang sebagai inovasi berkelanjutan dari perbaikan tata Kelola Data demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

Amanat dari Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik serta mendukung Sistem Statistik Nasional dan Satu Data Indonesia bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik memiliki tugas sebagai walidata untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan data statistik sektoral melalui Portal Satu Data. Diskominfo Provinsi Bali dalam Tahun 2022 telah menyusun Buku Metadata Statistik Sektoral.



Sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah, maka telah disusun Buku Bali Membangun Tahun 2021 yang menyajikan data – data statistik sektoral. Buku ini dipublikasikan secara rutin setiap tahun yang menyajikan data dan



informasi perencanaan pembangunan daerah mencakup data dan informasi, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi data kondisi geografis dan demografis daerah, dan data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Analisa singkat terhadap keberhasilan target disajikan pada tabel 3.5 sebagai berikut.

Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Tahun 2022			Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Komunikasi Dan Informasi Publik Yang Efektif Dan Efisien	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,52	3,68	146,03 %	Target Terlampau	
a.	Terwujudnya pelayanan komunikasi dan informatika yang berkualitas						
		Jumlah Sistem Pemerintahan berbasis elektronik	25 Aplikasi	25 Aplikasi	100%	Target Tercapai	
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	93	97,72	105,08 %	Target Terlampau	
		Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	81	81	100%	Target Tercapai	
		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82	*)	*)	Masih Dalam Proses Penilaian	



No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Tahun 2022			Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	5	6	7	8	9
		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	Target Tercapai	
		Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	75 Dokumen	75 Dokumen	100%	Target Tercapai	
		Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	100%	Target Tercapai	
		Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	1 Paket	1 Paket	100%	Target Tercapai	
		Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	Target Tercapai	



No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Tahun 2022			Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	5	6	7	8	9
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai	539 Unit	539 Unit	100%	Target Tercapai	
b.	Meningkatnya ketersediaan data statistik yang berkualitas.	Persentase data statistik sektoral yang valid	100	100	100	Target Tercapai	
		Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan diseminasi	11 Sektor	11 Sektor	100%	Target Tercapai	
c.	Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah	Persentase keamanan transaksi data dan informasi publik	80	80	100%	Target Tercapai	
		Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	38 OPD	38 OPD	100%	Target Tercapai	



No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Tahun 2022			Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	5	6	7	8	9
		Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun	38 OPD	38 OPD	100%	Target Tercapai	

Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Tahun 2022 semula sebesar Rp 152.283.895.782 dan beberapa kegiatan mendapatkan tambahan anggaran dalam rangka mendukung program prioritas, sehingga menjadi Rp 185.958.156.411 (bertambah sebesar Rp 33.674.260.629). Penyesuaian terjadi pada kegiatan:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tidak mengalami perubahan anggaran dengan alokasi sebesar Rp 23.090.900.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari pagu semula sebesar Rp 14.145.964.884 menjadi Rp 14.977.874.628 (bertambah Rp 831.909.744)
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dari pagu semula sebesar Rp 564.699.650 menjadi Rp 591.291.650 (bertambah Rp 26.592.000)
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tidak mengalami perubahan anggaran dengan alokasi pagu sebesar Rp 17.154.000
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari pagu semula sebesar Rp 401.135.000 menjadi Rp 421.135.000 (bertambah Rp 20.000.000)
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berkurang sebesar Rp 20.000.000 dari pagu awal Rp. 3.719.592.848 menjadi Rp 3.699.592.848



7. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik bertambah sebesar Rp 17.124.909.655 dari alokasi pagu awal Rp 31.593.389.965 menjadi Rp 32.971.039.965
8. Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi bertambah sebesar Rp 15.646.328.830 dari alokasi pagu awal Rp 116.737.802.736 menjadi Rp 132.384.131.566
9. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi tidak mengalami perubahan anggaran dengan alokasi pagu sebesar Rp 486.822.218
10. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi bertambah sebesar Rp 41.543.800 dari alokasi pagu awal Rp 212.092.878 menjadi Rp 253.636.678
11. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi bertambah sebesar Rp 2.976.600 dari alokasi pagu awal Rp 129.410.358 menjadi Rp 132.386.958

Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja diuraikan pada tabel 3.6 sebagai berikut:



Tabel 3.6 Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja

No	Sasaran / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terwujudnya Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang berkualitas							
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	93	97,72	105,08%	32.971.039.965	32.557.715.805	98,75%
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	81	81	100%	32.971.039.965	32.557.715.805	98,75%
2	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,52	3,68	146,03%	132.384.131.566	102.946.244.310	77,76%
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Pemerintah berbasis elektronik	25 Aplikasi	25 Aplikasi	100%	132.384.131.566	102.946.244.310	77,76%



No	Sasaran / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.50	*)	*)	19.730.139.026	19.124.553.577	96,93%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	23.090.900	19.050.400	82,50%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	75 Dokumen	75 Dokumen	100%	14.977.874.628	14.523.565.531	96,97%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	100%	591.291.650	561.354.086	94,94%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	1 Paket	1 Paket	100%	17.154.000	16.910.000	98,58%



No	Sasaran / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	421.135.000	400.280.437	95,05%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai	539 Unit	539 Unit	100%	3.699.592.848	3603.393.123	97,40%
	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik yang berkualitas							
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral Yang Valid	100%	100%	100%	486.822.218	458.815.228	94,25%
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan diseminasi	11 sektor	11 sektor	100%	486.822.218	458.815.228	94,25%



No	Sasaran / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah							
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik	80%	80%	100%	386.023.636	380.969.216	98,69%
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	38 OPD	38 OPD	100%	253.636.678	248.992.998	98,17%
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun	38 OPD	38 OPD	100%	132.386.958	131.976.218	99,69%
		TOTAL				185.958.156.411	155.468.298.136	83,60%



3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali tahun 2022 adalah 100% untuk realisasi fisik dan 83,60% untuk realisasi keuangan, maka terjadi efisiensi 16,40%. Data efisiensi penggunaan sumberdaya diuraikan pada tabel 3.7 sebagai berikut:



Tabel 3.7 Data efisiensi penggunaan sumberdaya

No	Sasaran / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terwujudnya Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang berkualitas								
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	93	97,72	105,08%	32.971.039.965	32.557.715.805	98,75%	1,25%
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	81	81	100%	32.971.039.965	32.557.715.805	98,75%	1,25%
2	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,52	3,68	146,03%	132.384.131.566	102.946.244.310	77,76%	22,24%
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Pemerintahan berbasis elektronik	25 Aplikasi	25 Aplikasi	100%	132.384.131.566	102.946.244.310	77,76%	22,24%



No	Sasaran / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.50	*)	*)	19.730.139.026	19.124.553.577	96,93%	3,07%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	23.090.900	19.050.400	82,50%	17,50%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	75 Dokumen	75 Dokumen	100%	14.977.874.628	14.523.565.531	96,97%	3,03%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	100%	591.291.650	561.354.086	94,94%	5,06%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	1 Paket	1 Paket	100%	17.154.000	16.910.000	98,58%	1,42%



No	Sasaran / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	421.135.000	400.280.437	95,05%	4,95%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai	539 Unit	539 Unit	100%	3.699.592.848	3603.393.123	97,40%	2,60%
	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik yang berkualitas								
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral Yang Valid	100%	100%	100%	486.822.218	458.815.228	94,25%	5,75%
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan diseminasi	11 sektor	11 sektor	100%	486.822.218	458.815.228	94,25%	5,75%



No	Sasaran / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah								
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik	80%	80%	100%	386.023.636	380.969.216	98,69%	1,31%
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	38 OPD	38 OPD	100%	253.636.678	248.992.998	98,17%	1,83%
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun	38 OPD	38 OPD	100%	132.386.958	131.976.218	99,69%	0,31%
						185.958.156.411	155.468.298.136	83,60%	16,40%



Realisasi Anggaran.

Dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp 185.958.156.411,- terealisasi Rp 155.468.298.136 atau 83,60 %. Rincian penggunaan anggaran diuraikan pada tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.8 Rincian penggunaan anggaran

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	32.971.039.965	32.557.715.805	98,75%
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	32.971.039.965	32.557.715.805	98,75%
2	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	132.384.131.566	102.946.244.310	77,76%
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	132.384.131.566	102.946.244.310	77,76%
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.730.139.026	19.124.553.577	96,93%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.090.900	19.050.400	82,50%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.977.874.628	14.523.565.531	96,97%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	591.291.650	561.354.086	94,94%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.154.000	16.910.000	98,58%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	421.135.000	400.280.437	95,05%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.699.592.848	3.603.393.123	97,40%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	486.822.218	458.815.228	94,25%
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	486.822.218	458.815.228	94,25%



No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	386.023.636	380.969.216	98,69%
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	253.636.678	248.992.998	98,17%
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	132.386.958	131.976.218	99,69%
	TOTAL	185.958.156.411	155.468.298.136	83,60%

Inovasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

Beberapa inovasi yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam pelayanan kepada Perangkat Daerah dan Masyarakat sbb:

1. Implementasi Sertifikat Elektronik pada Tanda Tangan Elektronik (TTE) kepada seluruh pejabat eselon 1 dan 2 di lingkup Pemerintah Provinsi Bali, Sebagai salah satu upaya pengamanan informasi elektronik
2. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi terpadu dan multi fungsi “Menara Turyapada Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali”
3. Pengembangan berbagai aplikasi dalam rangka mendukung Ekonomi Kerthi Bali (Love Bali, Portal Satu Pintu Pariwisata Bali, Sigapura, Neraca Pangan, Silebah, Simpelkan, Sistem Pendataan UMKM/IKM dan Koperasi, Aplikasi Made in Bali, VR Pulaki Tour dan Pameran 360 UMKM Bali Bangkit)
4. Pengembangan aplikasi Layanan Publik Digital (Bali Media centre, Bali Satu Data, Kantor Virtual Publik, Sisnaker, EvenID, Antrean dan Riwayat Kesehatan, Sikuat, Aplikasi Jidhat, dan Sensus Desa Adat)



5. Pengembangan Pusat Data dengan model penerapan hybrid (Cloud Server + on Premises) untuk meningkatkan kualitas layanan sesuai dengan tugas Diskominfo maka ditetapkan Motto:



6. Penyediaan layanan sound system lengkap dengan mobil unit dan tenaga sound yang siap setiap saat melayani kegiatan-kegiatan dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali
7. Pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi PPID
8. Memberikan layanan wifi gratis di wantilan desa adat, puskesmas dan daerah pariwisata tersebar di 8 Kabupaten/ Kota dalam rangka menunjang Bali Smart Island



BAB IV

PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Keberhasilan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2022 memiliki peran sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance dalam perspektif yang lebih luas. Selain itu, Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali kepada masyarakat. Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diharapkan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali tahun 2022 dengan kualitas pelaksanaan baik dan perlu ditingkatkan kinerjanya untuk mencapai prestasi yang lebih baik hingga tahun-tahun berikutnya.

Secara umum pencapaian sasaran strategis Tahun 2022 sesuai tugas pokok, fungsi dan misi yang diemban Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali telah berhasil, hal tersebut tercermin dari pencapaian sasaran strategis sesuai RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2018-2023

4.2 Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja

1. Kualitas SDM bidang IT masih relatif rendah dan kurangnya tenaga sandiman serta minimnya Alat Pendukung Utama (APU) persandian menyebabkan pelayanan dibidang IT dan keamanan informasi belum maksimal.
2. Minimnya masyarakat dalam mencari sebuah informasi publik mengindikasikan bahwa keberadaan PPID Provinsi Bali masih belum dikenal masyarakat secara luas.
3. Permintaan virtual machine dari perangkat daerah semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini menyebabkan sumber daya komputasi dari private coud semakin menurun



kapasitasnya. Pusat data juga belum memiliki back up server dan beberapa perangkat maupun jaringan di Pusat Data perlu diganti maupun diperbaiki, sehingga apabila terjadi down pada pusat data maka aplikasi tidak dapat diakses oleh public.

4. Dalam rangka pembangunan Taman Teknologi “Menara Turyapada Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali”, masih terdapat beberapa lahan di area pembangunan yang perlu dibebaskan guna mendukung konstruksi serta adanya faktor cuaca yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan *supply* material.

Upaya Penyelesaian:

1. Melakukan rekrutmen tenaga IT dan Mengusulkan pelatihan / bimtek SDM bidang IT serta bimtek tenaga sandiman;
2. Melakukan sosialisasi secara lebih luas ke masyarakat terkait peranan PPID dan melakukan bimbingan teknis PPID
3. Dalam rangka digitalisasi birokrasi dan efisiensi, maka perangkat daerah diarahkan menggunakan layanan cloud server dengan demikian pengadaan server baru tidak ada di masing-masing perangkat daerah dan selanjutnya terpusat menggunakan layanan cloud server. Untuk lebih memaksimalkan layanan pusat data, dilakukan pemeliharaan dan peremajaan peralatan jaringan pada Pusat Data.
4. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara lebih intens dengan pemilik lahan agar proses pembebasan lahan lebih cepat terselesaikan
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pekerjaan pembangunan Taman Teknologi “Menara Turyapada Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali” agar dapat selesai sesuai target.

4.3 Saran Dan Rekomendasi Saran

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali sesuai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian memiliki



peranan strategis dalam mendukung mewujudkan visi Kepala Daerah khususnya dukungan teknologi, informasi dan komunikasi. Untuk itu program-program bidang Komunikasi dan informasi perlu mendapat alokasi anggaran yang proposional, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan dll, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal

Rekomendasi

Agar peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dapat optimal dalam fungsinya sebagai penyebarluasan informasi baik melalui media yang bersifat konvensional/tradisional maupun secara online dengan dukungan TIK, maka diperlukan rekomendasi antara lain:

- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dapat menjadi rujukan bagi OPD kabupaten/kota
- Diperlukan dukungan secara input yang meliputi anggaran yang memadai, jumlah sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang memadai.
- Mendorong OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali maupun di kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan transparansi informasi di era keterbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, sehingga mendapatkan umpan balik guna peningkatan kinerja yang akuntabel bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali pada periode mendatang

